KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR bagi Rp 1,6 Triliun
Tanggal : Jumat, 13 Februari 2015
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

DPR Bagi Rp 1,6 Triliun

Tambahan Anggaran Rentan Diselewengkan

JAKARTA, KOMPAS – Setiap anggota DPR akan menerima dana tambahan Rp 1,78 miliar per tahun untuk menggaji lima tenaga ahli dan dua tenaga administrasi serta membiayai rumah aspirasi di daerah pemilihan. Dana ini hasil pembagian tambahan anggaran DPR tahun 2015 senilai Rp 1,63 triliun yang disepakati bersama pemerintah.

Sebanyak Rp 1 triliun dialokasikan untuk menggaji tambahan 3.920 tenaga ahli dan staf administrasi anggota DPR sekaligus membiayai rumah aspirasi di daerah pemilihan. Adapun Rp 635 miliar lagi untuk kebutuhan Sekretariat Jenderal DPR.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani, mengatakan, BURT sedang merumuskan rincian teknis pengalokasian dana tersebut. "Ini semua sesuai dengan Pasal 210 dan 213 Tata Tertib DPR bahwa anggota DPR bisa memiliki rumah aspirasi di dapil. Tidak ada aturan yang dilanggar," kata Irma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2).

Tatib DPR memang mengatur anggota DPR dapat memiliki rumah aspirasi untuk menampung suara publik. Anggota DPR bisa mengelola rumah aspirasi di daerah pemilihan dibantu dua tenaga ahli dan satu tenaga administrasi yang dibiayai negara.

Setiap tenaga ahli akan bergaji Rp 7,5 juta per bulan. "Sisanya untuk biaya operasional rumah aspirasi," ujar Irma.

Dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015, Senin lalu, Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan menyepakati tambahan Rp 1,635 triliun bagi DPR (*Kompas*, 11/2).

Sebenarnya, sejumlah anggota DPR sudah memiliki rumah aspirasi di daerah pemilihan secara mandiri. Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rudianto Tjen, mengatakan, dirinya sudah bertahun-tahun memiliki rumah aspirasi di Bangka Belitung. Selama ini ia mengelolanya dengan dana pribadi.

"Anggaran khusus ini justru membantu anggota DPR mengelola rumah aspirasi di dapil masing-masing. Salah satu tugas penting anggota DPR memang menyerap aspirasi masyarakat di dapil," kata Rudianto.

Rawan penyelewengan

Secara terpisah, Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggaran tambahan rawan diselewengkan. Seharusnya rumah aspirasi di daerah dibiayai partai politik, bukan dari APBN.

"Rumah aspirasi cukup dikelola dengan uang partai atau dana pribadi, jangan menggunakan uang negara, uang rakyat. Ini sangat rawan disalahgunakan," kata Uchok. (AGE)